

BAB IV

PERBANDINGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI BEBERAPA NEGARA

PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI BELANDA

Sebuah rancangan undang-undang haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Raad van Staten sebelum dapat dibahas. Raad van Staten adalah sebuah lembaga negara yang bertugas untuk memberikan pertimbangan semacam Dewan Pertimbangan Agung. Pemerintah Belanda mengirimkan rancangan undang-undang yang hendak diajukannya kepada *Staten General*, Perubahan undang-undang juga harus berdasarkan pertimbangan dari *Staten General*. Hal ini tertulis dalam Konstitusi Belanda Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan jika sebuah rancangan undang-undang akan disahkan, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada *Staten General* atau divisi dari *Staten General*. *Staten General* adalah perwakilan dari seluruh warga negara Belanda sebagai Parlemen yang terdiri dari *Tweede Kamer* dan *Eerste Kamer*. Anggota-anggota dari *Tweede Kamer* dipilih langsung oleh warga Belanda sedangkan anggota-anggota dari *Eerste Kamer* tidak dipilih secara langsung tapi dipilih oleh perwakilan dari negara-negara bagian (http://www.houseofrepresentatives.nl/how_parliament_works/legislation/index.jsp).

Anggota Parlemen dapat mengajukan sebuah rancangan undang-undang. Baik rancangan undang-undang yang diajukan oleh *Tweede Kamer* maupun oleh anggota parlemen, prosesnya sama yaitu harus terlebih dahulu diajukan kepada *Staten General* untuk mendapatkan rekomendasi. Selanjutnya rancangan undang-undang tersebut diteruskan kepada kepala Negara, dan Ratu Belanda yang menandatangani sebuah *royal message* untuk dilampirkan dalam rancangan undang-undang tersebut. Selain *royal message* tersebut dalam pengajuan pembahasannya juga harus dilampirkan surat rekomendasi dari *staten general*, dan harus juga dilampirkan memorandum berisi penjelasan atas tujuan dan isi dari setiap bagian rancangan undang-undang tersebut. (http://www.houseofrepresentatives.nl/how_parliament_works/legislation/index.jsp)

Sebuah rancangan undang-undang berdasarkan topik yang diurnya merupakan subyek penelitian lebih lanjut oleh panitia khusus di *Tweede Kamer*. Ada berbagai cara bagi panitia tersebut untuk meneliti rancangan undang-undang yang diajukan. Pihak-

pihak yang berkepentingan atas sebuah rancangan undang-undang dapat memberikan opini pada waktu diselenggarakan *public hearing*. Kadangkala panitia khusus dapat mengadakan *hearing* di tempat lain dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang hendak diatur dalam rancangan undang-undang yang diajukan. Panitia khusus dapat juga meminta keterangan dari badan-badan penasihat pemerintah, seperti badan perencanaan atau biro statistik ataupun narasumber ahli. Jika panitia khusus telah cukup mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan rancangan undang-undang tersebut maka partai-partai di parlemen lalu memberikan pandangannya secara tertulis.

(http://www.houseofrepresentatives.nl/how_parliament_works/legislation/index.jsp)

Berdasarkan *Rule of Procedure of the Tweede Kamer* Pasal 92 mengenai *Legislative Report*

- (1) *Before the committee starts to consider a bill, the clerk of the committee shall advise on whether it is desirable that a legislative report is published on the bill.*
- (2) *A legislative report shall be drawn up by the clerk of the committee.*

(http://www.houseofrepresentatives.nl/how_parliament_works/rules_of_procedure/index.jsp#Titlelink9)

Sekretaris panitia khusus akan membuat sebuah laporan yang dikirimkan kepada seluruh anggota *tweede kamer* dan kepada pemerintah, pihak pemerintah akan menanggapi semua catatan dan pertanyaan yang diberikan oleh anggota panitia khusus ini dalam laporan tersebut.

(http://www.houseofrepresentatives.nl/how_parliament_works/legislation/index.jsp)

Menurut *Rule of Procedure of the Tweede Kamer* Pasal 93

- (1) *The members of the House shall be entitled to submit their written comment on a bill to the Committee within such period as the Committee decides. Notices of the said period shall be given to the members of the House.*
- (2) *The Committee shall determine the period referred to in the first paragraph within fourteen days of the date on which the bill is referred to it.*

The Committee may decide that the comments of the members of the House shall be submitted not only in writing in the manner provided for in paragraph 1 but also at a meeting open to all members of the House. Each member of the House shall be entitled to take part in a meeting as referred to in the first sentence.

Setelah persiapan oleh panitia khusus ini selesai, Presiden *Tweede Kamer* mengusulkan supaya rancangan undang-undang tersebut diagendakan dalam rapat paripurna. Menteri dan Sekretaris Negara kemudian mewakili pihak pemerintah dalam pembahasan di rapat paripurna untuk menjelaskan maksud rancangan undang-undang yang diajukan dan harus mempertahankan proposal pengajuan rancangan undang-undang tersebut dalam persidangan di majelis *Tweede Kamer*. Dalam pembahasan di rapat

paripurna para anggota parlemen dapat mempergunakan hak mereka untuk mengubah rancangan undang-undang yang diajukan. Jika rancangan undang-undang tersebut telah disetujui atau disetujui dengan perubahan kemudian Presiden *Tweede Kamer* akan mengirimkan rancangan undang-undang yang telah disetujui tersebut kepada *Eerste Kamer*. *Eerste Kamer* hanya boleh menerima atau menolak sebuah rancangan undang-undang, *Eerste Kamer* tidak boleh mengubah sebuah rancangan undang-undang.

Berdasarkan *Rule of procedure of the Tweede Kamer* Pasal 91 bahwa *on the proposal of the committee, the House may decide that a general debate should be held on a bill before the Committee starts to consider it.* (http://www.houseofrepresentatives.nl/how_parliament_works/rules_of_procedure/index.jsp#Titlelink9).

Jika sebuah rancangan undang-undang harus melalui tahap persiapan maka tahap ini dilalui melalui proses korespondensi antara pihak panitia dengan pihak pemerintah, pertanyaan-pertanyaan dan pandangan-pandangan dari partai-partai di parlemen ditulis dalam sebuah dokumen yang kemudian akan dikirimkan kepada pihak pemerintah. Pihak pemerintah kemudian akan membalas dalam bentuk sebuah nota atau memorandum. Proses korespondensi ini bisa berlangsung beberapa kali, namun jika dilakukan sekali sudah dianggap cukup. (<http://www.eerstekamer.nl/howarebillsdealtwithbythesenate>). Dalam persidangan di *Eerste Kamer* naskah rancangan undang-undang tersebut kemudian dikaji oleh panitia dari parlemen, panitia ini yang kemudian mempertimbangkan apakah rancangan undang-undang tersebut akan dibahas langsung oleh kedua kamar atau perlu melalui tahap persiapan terlebih dahulu. Sebuah rancangan undang-undang dapat diagendakan dalam rapat penuh kedua kamar tanpa melalui tahap persiapan. (http://www.houseofrepresentatives.nl/how_parliament_works/rules_of_procedure/index.jsp#Titlelink9)

Dalam prakteknya pernyataan yang dibuat oleh pihak pemerintah dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang di rapat dengan pihak *Eerste Kamer* dapat dijadikan pegangan menginterpretasikan sebuah undang-undang ketika rancangan undang-undang tersebut kemudian telah disahkan.

(<http://www.eerstekamer.nl/whatisthefunctionofthesenate>).

Anggota *Eerste Kamer* dapat melakukan proses konsultasi internal dan eksternal. Konsultasi internal dilakukan oleh pihak partai-partai di parlemen dengan panitia yang berkaitan, sedangkan konsultasi eksternal dilakukan dengan warga masyarakat atau

organisasi-organisasi tertentu. Kadangkala para anggota *Eerste Kamer* menerima kunjungan delegasi dari warga masyarakat. *Eerste Kamer* dapat mengadakan proses dengar pendapat dengan warga masyarakat untuk kepentingan pembahasan sebuah rancangan undang-undang. (<http://www.eerstekamer.nl/whatelsedomembersofthesenatedo>).

Jika sebuah rancangan undang-undang telah melewati proses pembahasan di *Eerste Kamer* kemudian naskah tersebut akan dikembalikan kepada Ratu Belanda untuk ditandatangani, menteri atau menteri-menteri yang terkait juga menandatangani. Setelahnya naskah ini dikirimkan kepada menteri kehakiman yang juga akan menandatangani naskah rancangan undang-undang tersebut.

Rancangan undang-undang resmi menjadi undang-undang dua puluh hari semenjak diumumkan dalam buletin undang-undang yang merupakan jurnal resmi dari pemerintah untuk mengumumkan undang-undang yang terbaru. (http://www.houseofrepresentatives.nl/how_parliament_works/legislation/index.jsp). Hal ini sesuai dengan ketentuan Konstitusi Belanda Pasal 88 *The publication and entry into force of Acts of Parliament shall be regulated by Act of Parliament. They shall not be enter into force before they have been published.* (www.minbzk.nl)

Dewan atau anggota dewan yang mengajukan rancangan undang-undang harus menjelaskan maksud dan tujuan dari rancangan undang-undang, dan harus mempertahankan proposal pengajuannya, ini jika sebuah rancangan undang-undang diajukan oleh dewan atau anggota dewan. Pihak menteri yang terkait dan sekretaris negara harus menghadiri sidang pembahasan rancangan undang-undang ini dalam rapat paripurna di *Eerste Kamer*. Para menteri terkait, menteri kehakiman dan Ratu Belanda akan menandatangani rancangan undang-undang tersebut yang kemudian juga akan diumumkan dalam buletin undang-undang. (http://www.houseofrepresentatives.nl/how_parliament_works/legislation/index.jsp)

PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI JERMAN

Ada tiga pihak yang akan terlibat dalam pembentukan undang-undang di Jerman yaitu *The Federal Government*, *Bundestag*, dan *Bundesrat*. Pihak *Federal Government* yang paling sering untuk mengajukan inisiatif pembentukan undang-undang dan sekitar dua pertiga undang-undang di Jerman merupakan inisiatif dari *Federal Government*.

(http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_360492/EN/funktionen-en/gezetgebung-en/gezetgebung-en-node.html_nnn=true).

Federal Government pihak *Bundesrat* juga dapat berinisiatif dalam mengajukan undang-undang. Sebuah undang-undang haruslah mendapat persetujuan dari *Bundesrat* sebagai perwakilan dari 16 negara bagian di Jerman berdasarkan Pasal 50 *Grundgesetz* (http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_360492/EN/funktionen-en/gezetgebung-en/gezetgebung-en-node.html_nnn=true).

Jika sebuah undang-undang merupakan inisiatif dari *Bundestag* maka setidaknya harus mendapat dukungan dari lima persen aggotanya yaitu 5 persen dari 614 anggota, jadi setidaknya didukung oleh 31 orang anggota (http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_360492/EN/funktionen-en/gezetgebung-en/gezetgebung-en-node.html_nnn=true).

Inisiatif pembentukan undang-undang di Jerman yang berasal dari *Bundesrat* haruslah terlebih dahulu disampaikan kepada pihak Pemerintah Pusat Jerman untuk diteruskan kepada pihak *Bundestag*, jika inisiatif berasal dari pihak Pemerintah Pusat Jerman maka akan diajukan terlebih dahulu ke *Bundesrat* untuk dikaji terlebih dahulu yang dikenal sebagai *First Reading*, selain itu pihak pemerintah harus membuat sebuah dokumen yang berisi mengenai penjelasan rancangan undang-undang tersebut. Hasil kajian *first reading* dan dokumen keterangan rancangan undang-undang dari pemerintah tersebut kemudian dikirimkan ke *Bundestag* (http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_360492/EN/funktionen-en/gezetgebung-en/gezetgebung-en-node.html_nnn=true).

1. Alur Legislasi di *Bundesrat*

a). *First Reading*

Tujuan utama dari *first reading* adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat luas sebuah rancangan undang-undang sedang dibahas di *Bundesrat*. Pembahasan dalam sebuah sidang hanya dilakukan bila ada permintaan dari ketua-ketua kelompok di *Bundesrat* atau diminta kelompok di *Bundesrat*. Jika masyarakat telah mengetahui bahwa suatu isu sedang dibahas dalam sebuah rancangan undang-undang maka mereka kemudian akan menjadi *aware* atas isu tersebut dan masyarakat dapat merespon apa yang terjadi selama proses pembahasan berlangsung berkenaan dengan kepentingan mereka melalui media massa. Jadi tujuan utama forum ini adalah sebagai sebuah proses transparansi (http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_360492/EN/funktionen-en/gezetgebung-en/gezetgebung-en-node.html_nnn=true).

b). Second Reading

Sebuah naskah rancangan undang-undang yang telah selesai dibahas dalam forum *first reading* akan diteruskan pembahasannya dalam forum *second reading* di *Bundesrat*. Ada beberapa kemungkinan dari pembahasan ini yaitu bahwa pihak *Bundesrat* akan menyetujui rancangan undang-undang tersebut atau menolak dan kemudian akan membentuk panitia mediasi untuk membahas lebih lanjut. Jika *Bundesrat* menolak sebuah rancangan undang-undang, sebelumnya mereka harus membahasnya, jika disetujui akan dikirimkan ke *Bundestag* untuk pemrosesan lebih lanjut (http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_360492/EN/funktionen-en/gezetgebung-en/gezetgebung-en-node.html_nnn=true).

Ketua *Bundesrat* akan meminta *committee rapporteur* atau *rapporteurs* untuk memberikan laporan tertulis mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan isu yang akan diatur, ruang lingkup pengaturan, dan tujuan pengaturan. Pembahasan dimulai dengan membahas pasal perpasal secara terpisah yang kemudian diputuskan melalui lewat voting satu orang satu suara. Selama masa sidang *second reading* pembahasan rancangan undang-undang ini tidak boleh dilakukan perubahan atas draft rancangan undang-undang tersebut (http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_360492/EN/funktionen-en/gezetgebung-en/gezetgebung-en-node.html_nnn=true).

Selama dalam masa persidangan ketua sidang harus memperhatikan apa pendapat dari anggota-anggotanya yang disampaikan dalam forum dengar pendapat umum tersebut karena jika pendapat-pendapat anggota tersebut tidak diperhatikan maka mereka akan bersikap berlawanan dengan kebijakan yang akan dibuat tersebut. Hal tersebut akan dilihat sebagai sebuah perpecahan di Parlemen yang akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen dalam membuat kebijakan. Sering terjadi di Parlemen Jerman jika seorang anggota berbeda pendapat maka mereka akan menuliskannya dalam sebuah nota tertulis yang kemudian akan diputuskan dalam sebuah sidang melalui mekanisme voting (http://www.bundesrat.de/cln_090/nn_360492/EN/funktionen-en/gezetgebung-en/gezetgebung-en-node.html_nnn=true).

c). Mekanisme Mediasi

Proses mediasi dapat dilakukan apabila ada permintaan dari *Bundesrat*, sementara pihak *Bundestag* Pemerintah Pusat hanya dapat meminta mediasi apabila pihak *Bundesrat* menolak untuk menyetujui sebuah rancangan undang-undang. Mediasi

berupaya untuk membuat kesepakatan atas perbedaan pendapat antara *Bundesrat* dan *Bundestag*. Anggota panitia mediasi dapat mengajukan mosi penghentian mediasi jika setelah dua kali pertemuan belum juga dicapai sebuah kesepakatan.

Panitia legislasi terdiri dari 16 anggota *Bundestag* yang mewakili kekuatan kelompok partai-partai di Parlemen dan 16 anggota *Bundesrat* yang mewakili Negara-negara bagian di Jerman. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi ini harus bersikap imparisial. Ketua panitia mediasi dipilih bergiliran dari *Bundestag* dan *Bundesrat* setiap tiga bulan sekali. Pertemuan mediasi bersifat *confidential* segala macam dokumen yang dihasilkan dalam proses mediasi tidak boleh dibuka untuk umum, dapat dibuka setidaknya setelah masa pemilihan berikutnya. Jika dokumen proses mediasi terbuka untuk umum dikhawatirkan bahwa para anggota panitia mendapat tekanan dari berbagai macam pihak untuk mewakili kepentingan-kepentingan mereka sehingga dianggap tidak netral.

Frekuensi pertemuan dari panitia ini tidak tentu tergantung dari besarnya perbedaan pendapat yang ada dan bagaimana konstelasi kepentingan yang ada, diharapkan proses mediasi ini dapat memenuhi kepentingan semua pihak dan terbentuk naskah rancangan undang-undang yang dianggap ideal memenuhi kepentingan para pihak. Ketika proses mediasi telah selesai, pihak panitia legislasi akan memberikan proposal yang merupakan kesepakatan kepada pihak *Bundesrat* dan *Bundestag*.

d). Penandatanganan dan Pengumuman

Rancangan undang-undang yang telah disepakati oleh kedua kamar di Parlemen akan dikirimkan kepada pemerintah Jerman untuk ditandatangani oleh menteri yang berkaitan dan untuk menguatkan validitas berlakunya harus ditandatangani oleh Presiden dan kemudian diumumkan di dalam *Federal Law Gazette* dan efektif berlaku berdasarkan tanggal pemuatannya.

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI AMERIKA

Berdasarkan *United States of America Constitution* Article I, Section 1, of the United States

“All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.”

Kekuasaan legislative di Amerika berada ditangan Parlemen (*Congress*) yang terdiri dari Senat dan *The House of Representatives (House)*. Kekuatan suara dari seorang senator dan seorang anggota *House* adalah sama besar. Di Parlemen Amerika tidak dikenal fungsi *Upper House* dan *Lower House*, kedua lembaga ini di Amerika mempunyai kekuatan sama besar. Fungsi utama parlemen di Amerika adalah membentuk undang-undang. (How our law are made <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>).

Sebuah rancangan undang-undang dapat berasal dari anggota dewan dan dapat juga berasal dari pemerintah yang dikenal dengan "*The Executive Communication*" yaitu surat permohonan yang dilampiri dengan draft rancangan undang-undang yang diajukan kepada juru bicara *House* dan Ketua Senat (How our law are made <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>). Sebuah rancangan undang-undang dapat menjadi sebuah undang-undang hanya jika:

1. Presiden menyetujui.
2. Presiden tidak menyetujui yang kemudian dikembalikan kepada Parlemen dalam jangka waktu 10 hari setelah diterima (kecuali jika jatuh di hari minggu pada hari kesepuluh maka diundur sehari), ini disebut sebagai veto.
3. Apabila 2/3 anggota Parlemen tetap menyetujui rancangan tersebut menjadi undang-undang walau telah di veto oleh Presiden.
4. Jika Presiden tetap tidak mau menandatangani rancangan undang-undang tersebut maka rancangan undang-undang tersebut tidak dapat menjadi undang-undang, ini dikenal sebagai *pocket veto*. (How our law are made <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>).

Proses Pembahasan Sebuah Rancangan Undang-Undang

Panitia rancangan undang-undang tersebut akan mencari masukan-masukan dari beberapa pihak diantaranya departemen-departemen pemerintah terkait, atau lembaga-lembaga Negara. Dan jika sebuah rancangan undang-undang dianggap penting maka dapat diagendakan sebuah *public hearing* yang diumumkan di media massa minimal seminggu sebelum pelaksanaannya dan juga diundang secara khusus untuk hadir orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Mekanisme ini disebut *first reading* (How our law are made <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>).

Proses Pembahasan Sebuah Rancangan Undang-Undang

Panitia rancangan undang-undang akan mencari masukan-masukan dari beberapa pihak diantaranya dari departemen-departemen pemerintahan atau lembaga-lembaga Negara. Sebuah rancangan undang-undang yang krusial dapat diagendakan dalam forum *public hearing* yang diumumkan di media massa minimal seminggu sebelum pelaksanaannya dan juga dapat diundang secara khusus pihak-pihak tertentu di masyarakat yang berkepentingan langsung terhadap permasalahan yang diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.

Panitia rancangan undang-undang wajib untuk membuat laporan tertulis yang berisi isu permasalahan yang hendak diatur, tujuan pengaturan dan ruang lingkup pengaturan. Dalam laporan ini setidaknya memuat hal-hal:

1. Pandangan dari panitia rancangan undang-undang ini mengenai masalah yang akan diatur ini beserta rekomendasi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh panitia ini.
2. Perubahan anggaran jika akan mempengaruhi anggaran belanja negara yang sedang berjalan.
3. Gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan dan tujuan pengaturan tersebut secara umum termasuk mengenai *impact* yang ingin dihasilkan. (How our law are made <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>).

Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Setelah pertemuan pertama *first reading* diteruskan dalam pembahasan *second reading* untuk membahas pasal-perpasal, setelah pasal-perpasal tersebut dibacakan kemudian dapat diajukan perubahan terhadap rumusan pasal tersebut. Dalam proses ini jika anggota *House* masih belum terdapat persetujuan dapat dibentuk "*Committee Rises*" untuk untuk membahas ulang rancangan undang-undang tersebut, jika rumusan yang ada telah disetujui maka akan dibahas lebih lanjut dalam *third reading*. Lalu naskah rancangan undang-undang tersebut dicetak untuk dibagikan kepada pihak *House* dan Senat. (How our law are made <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>).

Setelah dokumen *second reading* diterima senat maka secara individu atau kelompok senat akan memberikan pandangannya. Setelah proses pembahasan di senat selesai dokumen tersebut dikembalikan (disertai dengan perubahan jika ada) kepada

pihak *House* melalui juru bicara *House*. Jika usulan perubahan dari Senat tidak terlalu berbeda dengan *House* maka biasanya usulan tersebut dapat langsung diterima dan usulan rancangan undang-undang ini dapat langsung dipresentasikan kepada Presiden Amerika, namun jika usulan perubahannya banyak perbedaan maka akan ada pembahasan ulang di *House* atas rancangan tersebut. (How our law are made. <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>). Jika pihak *House* masih belum bisa menerima usulan perubahan dari Senat maka rancangan undang-undang tersebut kemudian dibahas oleh kedua kamar dalam satu sidang bersama. Dari forum ini kemudian dibuat laporan sidangnya. (How our law are made <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>).

3. Rancangan Undang-undang yang berasal dari Senat

Jika sebuah rancangan undang-undang berasal dari *House*, maka usulan rancangan undang-undang tersebut kemudian akan dikirimkan kepada *House* untuk dibahas, jika disetujui maka diteruskan kepada tahap berikutnya, namun jika masih belum dapat diterima maka akan dikembalikan lagi kepada Senat. (How our law are made <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>).

4. The Government Action

Setelah sebuah naskah rancangan undang-undang telah disepakati oleh kedua kamar maka draft tersebut dikirimkan kepada Presiden Amerika untuk mendapat persetujuan. Rancangan undang-undang tersebut dikirimkan oleh pihak yang mengusulkan kepada sekretaris *White House* yang kemudian akan memberikan tandaterima hal ini sudah cukup dan dianggap bahwa naskah rancangan undang-undang tersebut telah dipresentasikan di depan Presiden Amerikan. Copy naskah ini kemudian akan dikirimkan kepada departemen-departemen pemerintahan yang terkait untuk dimintai pertimbangannya. Presiden menyetujui dan menandatangani maka akan menjadi undang-undang, namun jika Presiden memveto maka dikembalikan kepada pihak pengusul disertai dengan alasan-alasan penolakannya agar rancangan tersebut dibahas ulang lagi, namun jika 2/3 anggota parlemen menolak veto tersebut, rancangan undang-undang ini akan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang yang telah menjadi

undang-undang akan diundangkan dalam "The State at Large" semacam lembaran negara untuk diberi nomor undang-undangnya dan akan berlaku efektif setelah diumumkan dalam *State at Large* tersebut. (How our law are made <http://www.senate.gov/reference/resources/pdf/howourlawsaremade.pdf>).

D. PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI FILIPINA

Pengajuan undang-undang baik di Senat maupun di *House* sama prosedurnya, kebanyakan Senat dalam mengajukan sebuah rancangan undang-undang juga berdasarkan permintaan dari pihak eksekutif. (http://www.senate.gov.ph/lis/leg_sys.aspx?congress=14&type=bill). Setiap tahun Presiden Filipina akan mengumumkan arah kebijakannya dalam *State of the Nation Address*, staf-staf dari departemen-departemen pemerintah dan lembaga-lembaga negara kemudian akan mengirimkan proposal legislasi baik kepada Senat maupun *House* berdasarkan program legislasi tersebut. (http://www.senate.gov.ph/lis/leg_sys.aspx?congress=14&type=bill).

Parlemen adalah pihak yang dapat mengajukan sebuah rancangan undang-undang. *House* dan Senat dapat secara bersama-sama berinisiatif untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang dalam rangka untuk mempercepat proses pembahasannya. (http://www.senate.gov.ph/lis/leg_sys.aspx?congress=14&type=bill).

a). Pembahasan Undang-Undang

Rancangan undang-undang hanya akan dibacakan judul dan nama pengusulnya saja dalam *Chamber* (Kamar), pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam komisi-komisi yang ada di dewan yang sesuai dengan permasalahan yang akan diaturnya. Pembacaan judul rancangan undang-undang ini dikenal sebagai *first reading*. (http://www.senate.gov.ph/lis/leg_sys.aspx?congress=14&type=bill). Panitia komisi kemudian akan membuat laporan pembahasan di dalam komisi ini mengenai tujuan dan lingkup pengaturan, menerangkan perubahan-perubahan apa yang terjadi selama proses pembahasan, dan pemberbandingkan dengan undang-undang yang berlaku yang ada. (http://www.senate.gov.ph/lis/leg_sys.aspx?congress=14&type=bill).

b). Second reading

Pihak yang mengajukan rancangan undang-undang kemudian akan membacakan proposal pengajuannya dalam sidang di Senat. Kemudian akan dibuka sesi untuk mencari fakta pro dan kontra permasalahan yang akan diatur tersebut yang jika disetujui proses akan berlanjut kepada *third reading*, jika sidang tidak menyetujui maka lopperan dari sidang komisi dan naskah asli akan disandingkan untuk dipakai dalam *third reading*. (http://www.senate.gov.ph/lis/leg_sys.aspx?congress=14&type=bill).

c). Third Reading

Naskah hasil proses *second reading* kemudian akan dibagikan kepada anggota dewan, namun proses pembahasannya hanya dengan membacakan judul rancangan undang-undang tersebut yang kemudian dilakukan proses voting untuk membuat kesepakatan. Jika telah ada persetujuan bersama maka naskah tersebut kemudian dikirimkan kepada *House* untuk mendapat persetujuan bersama, proses pembahasan di *House* sama dengan mekanisme pembahasan di *Senat* yaitu melalui *first reading*, *second reading*, dan *third reading*. (http://www.senate.gov.ph/lis/leg_sys.aspx?congress=14&type=bill).

d). Pengesahan

Jika kedua *Chamber* (Kamar) di Parlemen telah menyetujui dokumen *third* naskah tersebut kemudian akan diundangkan. Sedangkan bila tidak tercapai persetujuan diagendakan sebuah sidang bersama di Parlemen yang dihadiri oleh anggota-anggota dari kedua *Chamber* (Kamar) tersebut. Setelah mendapat persetujuan bersama naskah tersebut dikirimkan ke Malacanang untuk ditandatangani oleh Presiden Filipina. Apabila Presiden menolak untuk menandatangani maka naskah tersebut dapat dikembalikan ke pengusulnya (veto) namun jika 2/3 anggota parlemen menolak veto ini maka tetap akan berlaku menjadi undang-undang. Jika Presiden menolak untuk menandatangani tapi tidak mengembalikan kepada pengusulnya maka dalam waktu 30 hari setelah diterima akan efektif menjadi undang-undang. (http://www.senate.gov.ph/lis/leg_sys.aspx?congress=14&type=bill).